

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI
DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA MEDAN**

TESIS

OLEH

**RINA LESTARI BR. SEMBIRING
NPM.101803047**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Investasi Daerah
Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di
Kota Medan**

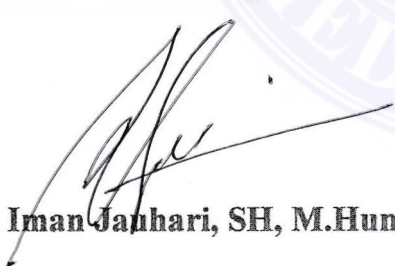
Nama : Rina Lestari Br. Sembiring

NPM : 101803047

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Iman Janhari, SH, M.Hum



Taufik Siregar, SH. M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Telah diuji pada Tanggal 21 April 2014

Nama : Rina Lestari Br. Sembiring
NPM : 101803047



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH, M.Hum
Pembimbing II : Taufik Siregar., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Prof. Dr. Suhaidi, SH., M.H

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2014
Yang menyatakan,



Rina Lestari Br. Sembiring

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA MEDAN**

Nama : Rina Lestari Br. Sembiring
NPM : 101803047
Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum
Pembimbing II : Taufik Siregar, SH. M.Hum

ABSTRAK

Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota otonom. Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, dibutuhkan adanya sistem yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar, dan daerah yang kaya membantu daerah yang miskin. Dalam sistem ini, penyerahan wewenang (desentralisasi) berbarengan dengan pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan tugas perbantuan. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, daerah akan berupaya meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuannya. Kewenangan daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional, regional maupun global. Dalam penelitian ini permasalahan yang ingin dijawab adalah: 1. Bagaimana pengaturan mengenai investasi di kota medan, 2. Bagaimana kebijakan investasi di Kota Medan, 3. Bagaimana kendala dalam menerapkan kebijakan investasi di Kota Medan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan gejala-gejala subyek suatu kelompok yang menjadi obyek penelitian atau bersifat fenomenologis, yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mengenai investasi daerah diatur melalui Perda-perda yang merupakan sarana tidak langsung yang menjadi sumber pendapatan daerah untuk membangun perekonomian masyarakat. Kebijakan investasi yang diterapkan Pemerintah Kota Medan antara lain membentuk institusi kantor penanaman modal daerah kota Medan, membentuk Medan Bisnis Forum (MBF), dan mempersiapkan unit pelayanan terpadu (upt) satu atap. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan investasi berupa Masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan, dan tingginya biaya investasi.

Kata Kunci: Investasi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

LEGAL STUDY OF THE REGIONAL INVESTMENT POLICY IN ORDER TO INCREASE REVENUE IN MEDAN

NAME : Rina Lestari Br. Sembiring

NPM : 101803047

Mentor I : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum

Mentor II : Taufik Siregar, SH., M.Hum

ABSTRACT

Indonesian territory is divided into provinces , districts , and autonomous city . Because of the diversity of autonomous regions in Indonesia requires the existence of schemes whereby inequality is not getting wider area , and areas rich help the poor areas . In this system, the delegation of authority (decentralization) coincided with the delegation of authority (deconcentration) and assistant task . Through its authority to regulate and manage the interests of the community , the region will work to improve the economy in accordance with the conditions , needs and abilities . Local authority through decentralization is expected to provide maximum services to the business community in the area , both locally , nationally , regionally and globally. In this study the problem to be answered are : 1 . How regulation on investment in the city field , 2 . How investment policy in Medan , 3 . How constraints in implementing the investment policy in Medan . This research is a descriptive study . This study uses the approach and the symptoms of a group of subjects who became the object of research or phenomenological nature , which seeks to understand the meaning of events and its relation to the ordinary people in particular situations. The results showed that the law setting the investment regions governed by local regulations are an indirect means of a source of income for the local economic development community. Investment policy implemented by the government of Medan , among others, make up the regional investment office in Medan , Medan formed Business Forum (MBF) , and prepare an integrated service unit (upt) one roof . Constraints faced by the Government of Medan in increasing investment in service quality is still low bureaucracy , the length of time required for the licenses, and the high cost of investment .

Keywords : Investment Regions , Local Revenue

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia NYA yang begitu besar kepada Kita semua. Penulis telah menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Investasi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan”**. Tesis ini diajukan sebagai satusyarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak **Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum** selaku pembimbing I dan Bapak **Taufik Siregar, SH.M.Hum** selaku Pembimbing II.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang memberikan dukungan moral, langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, MA
2. Ibu Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS.
3. Ibu Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Seluruh Dosen dan Pegawai beserta Staff Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, April 2014

Rina Lestari Br. Sembiring
10180304 7

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	11
1.3.Tujuan Penelitian.....	12
1.4.Manfaat Penelitian.....	12
1.5.Kerangka Teori dan Konsepsi	
1.5.1.Kerangka Teori.....	12
1.5.2.Kerangka Konsepsi.....	19
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1.Pertumbuhan Investasi Daerah Kota Medan	21
2.2. Fasilitas Investasi.....	25
2.3.Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Daerah.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Spesifikasi Penelitian.....	38
3.2. Metode Pendekatan	38
3.3. Lokasi Penelitian	39
3.4. Alat Pengumpulan Data.....	39
3.5. Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	41
4.2. Pembahasan	48
4.2.1. Kebijakan Investasi Yang Diterapkan Pemerintah Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	48
4.2.2. kendala dalam Penerapan Kebijakan Investasi di Kota Medan	61
4.2.2.1. Faktor-faktor internal penghambat investasi	61
4.2.2.2. Faktor-faktor eksternal penghambat investasi	66
4.2.4. Strategi untuk menarik investor melakukan investasi	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	viii
-----------------------------	-------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota otonom. Secara teknis, kabupaten dan kota mempunyai level yang sama dalam pemerintahan. Pembagian tersebut berdasarkan atas apakah administrasi pemerintah berlokasi di wilayah pedesaan atau di wilayah perkotaan. Di dalam kabupaten dan kota terdapat kecamatan yang merupakan unit pemerintahan administratif yang lebih kecil. Setiap kecamatan dibagi menjadi desa. Desa di wilayah pedesaan disebut desa, sedangkan di wilayah perkotaan disebut kelurahan.

Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, dibutuhkan adanya sistem yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar, dan daerah yang kaya membantu daerah yang miskin. Dalam sistem ini, penyerahan wewenang (desentralisasi)¹ berbarengan dengan pelimpahan wewenang (desentralisasi) dan tugas perbantuan.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan

¹ Apkasi, "prospek Otonomi daerah Di Masa Mendatang" makalah, disajikan pada sminas Tantangan Otonomi Daerah : Strategi Pemberdayaan Daya Saing Daerah, 5-6 September 2001, Universitas Medan Area Jakarta, hlm.2

keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal:

1. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perkonomian daerah².

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dari aspek ekonomi, kebijakan Otonomi Daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi Daerah

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil 2004, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Universitas Medan Area, Jakarta Sinar Grafika, hlm9

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Apkasi, "*Pemberdayaan Investasi Daerah*", makalah Disajikan pada Seminar Tantangan Otonomi Daerah : Strategi Pemberdayaan Daya Saing Daerah, APKASI-Majalah Gatra- Paragon Communications, Ballroom Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 5-6 September 2001.

_____, "*Prospek Otonomi Daerah Di Masa Mendatang*" makalah, Disajikan pada Seminar Tantangan Otonomi Daerah: Strategi Pemberdayaan Daya Saing Daerah, Disajikan pada Seminar Tantangan Otonomi Daerah: 5-6 September 2001.

Aria S. Susunan, "*Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2000 - 2005 Penelitian Magister Manajemen Universitas Lampung*, Bandar Lampung, 12 Maret 2008.

Bambang P.S. Brodjonegoro. 1999. "*The Impact of Current Asian Economic Crisis to Regional Development Pattern in Indonesia*". Makalah Seminar LPEM-USAID,

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001.

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.

Devarita, "*Pemikiran Roscoe Pound (Realistic Jurisprudence/Rechtshule) dalam Teori Hukum Sebagai Alat Pengubah Masyarakat*", makalah Teori Hukum Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional tahun 2007.

Dian Puji N. Simatupang, 2005, *Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia*, Studi Yuridis, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Doli D. Siregar, 2004, *Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi Dan Otonomi Daerah*, Cetakan pertama, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Ermaya Suradinata, 2006, *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru, Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis*, Suara Bebas, Jakarta.

Hadis Setia Tunggal, 2005, *Undang-undang Pemerintahan Daerah*, Harvarindo,

Jakarta.

Halim Alamsyah, 2005, *Statement Kebijakan Moneter Gubernur Bank Indonesia Mengenai Evaluasi Perkembangan Ekonomi 2005, Prospek, Dan Arah Kebijakan Bank Indonesia*, Press Release pada Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat, Jakarta.

Juli Panglima Saragih, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Krishna D. Darumurti dan Umbu Raufa, 2003, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mudrajat Kuncoro, "Otonomi Daerah dalam Transisi", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Global, 12 April, Yogyakarta, 1997.

_____, 2001, *Desentralisasi Sekedar Alat, Desentralisasi, Globalisasi, Dan Demokrasi Lokal*, (LP3ES), Jakarta.

M. Soilly Lubis, 2000, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung, Mandar Maju.

Muh. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mudrajat Kuncoro, 2001, *Desentralisasi Sekedar A/at, Desentralisasi, Globalisasi, Dan Demokrasi Lokal*, (LP3ES), Jakarta.

Noeng Muhajir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Vol.III, Rakesarasin*, Yogyakarta.

Oentarto Sindung Mawardi, 2002, "Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Permasalahan Dan Tantangan", *Ceramah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Pada Acara Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang*, Jakarta

Robert Klitgaard, et.all, 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta.

Rudy, "Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Komunitas Lokal.", *artikel, ISSN: 0917-8376 I Edisi Vol.6/XVIII/Maret 2006 — Nasional*, Jakarta.

Sidik Jatmika. 2001. *Otonomi Daerah; Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta

S. H. Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar

Harapan, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Keempat*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta.

Tubagus Haedar Ali, "*Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyelenggaraan Otonomi*," Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat (SPER) selama 6 bulan (Januari — Juni 2002), Jakarta.

W. J. S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

Wimpy S. Tjetjep, 2002, *Dari Gunung Api Hingga Otonomi Daerah*, Yayasan Media Bhakti Tambang, Jakarta, 2002.

Draf Final ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kota Medan Tahun 2000-2006, Kerjasama Badan Pusat Statistik Kota Medan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2007.

Laporan Pendahuluan Bappeda Kota Medan Tentang Penyusunan data dan Informasi Potensi Investasi /Penanaman Modal Kota Medan Tahun anggaran 2008.

Laporan Akhir Bappeda Kota Medan Tentang Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk UKMK Kota Medan Tahun 2007.

Rancangan Laporan Akhir Perencanaan pembangunan Bidang ekonomi Kota Medan Tahun 2007.

B. Website

Aditiawan Chandra, "Strategi Investasi Untuk Menarik Investor", <http://businessenvironmentwordpress.com/2006/10A94/strategiinvestasi-untuk-menarik-investor/>

Dadan, bersama Tim JPIP harian Jawa Pos, "Desentralisasi Fiskal dan Pertarungan Kewenangan Pusat-Daerah, " jatim.go.id/dpd-ri/articles.php?id=12, 28 juli 2010, diakses tanggal 10 April 2012.

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomiindustri/2003/1231/indl.html>, diakses tanggal 25 Agustus 2012.

C. Perundang-Undangan

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

· UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.